



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021

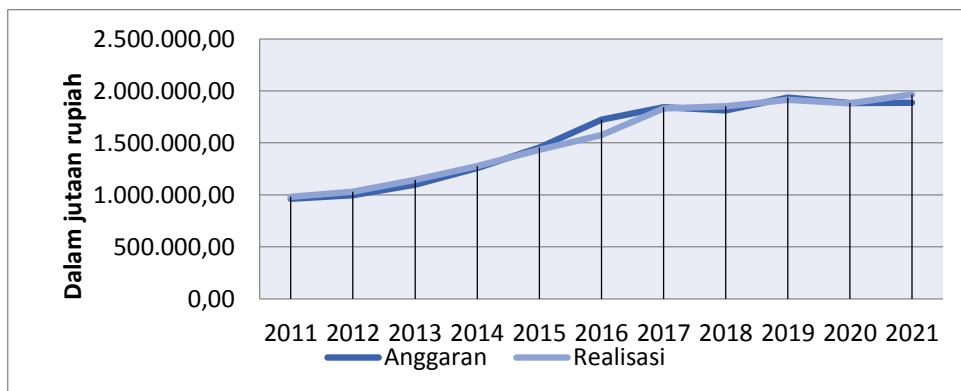
Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2021			Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)x100	(6)=(3)-(4)
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	104,29	81.035.526.507,00
2	Belanja dan Transfer	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	91,78	166.575.184.615,00
	Surplus/(Defisit)	(139.927.652.466,00)	107.683.058.656,00	(76,96)	(247.610.711.122,00)
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	100,01	(14.550.000,00)
2	Pengeluaran Pembiayaan	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	69,38	4.448.511.361,00
	Pembiayaan Neto	139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	103,19	(4.463.061.361,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	252.073.772.483,00	-	(252.073.772.483,00)

Tabel III.1 tersebut menunjukkan ikhtisar anggaran dan realisasi TA 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

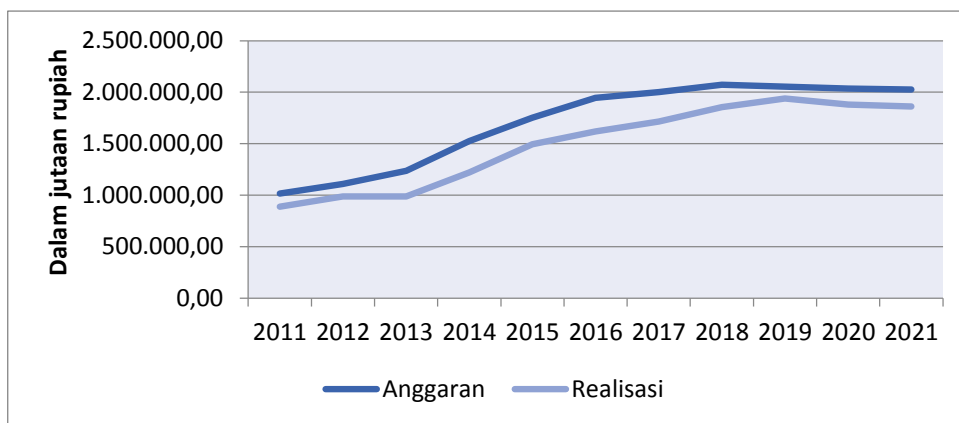
- Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2021 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp1.886.745.523.085,00, sedangkan realisasinya sebesar 104,29% yaitu sebesar Rp1.967.781.049.592,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.1 berikut ini.



Gambar III.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2011 s/d TA 2021

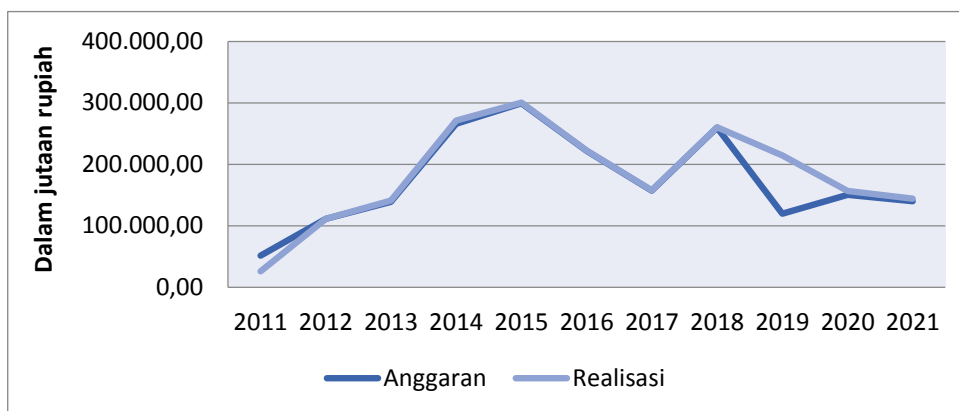


- b. Belanja dan transfer Kabupaten Wonosobo TA 2021 diproyeksikan dalam APBD sebesar Rp2.026.673.175.551,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 91,78% yaitu sebesar Rp1.860.097.990.936,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi belanja dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.2 berikut ini.



Gambar III.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2011 s/d TA 2021

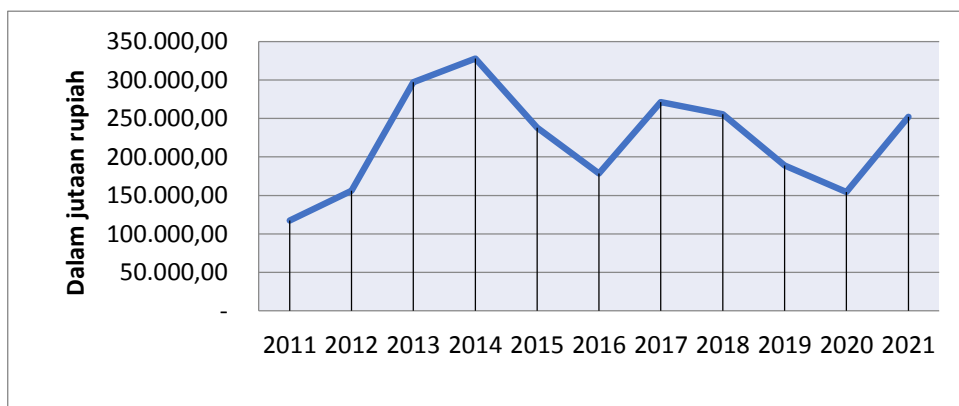
- c. APBD TA 2021 telah ditetapkan defisit sebesar (Rp139.927.652.466,00) dan dapat terealisasi sebesar Rp107.683.058.656,00.
- d. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 154.455.652.466,00, sedangkan realisasinya sesuai ketentuan sebesar 100,01% yaitu sebesar Rp 154.470.202.466,00.
- e. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.528.000.000,00, sedangkan realisasinya hanya sebesar 69,38 % yaitu sebesar Rp10.079.488.639,00.
- f. Pembiayaan netto Kabupaten Wonosobo TA 2021 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp139.927.652.466,00, sedangkan realisasinya melebihi ketentuan sebesar 103,19% yaitu sebesar Rp144.390.713.827,00. Untuk lebih jelasnya, anggaran dan realisasi pembiayaan netto dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.3 berikut ini.



Gambar III.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2011 s/d TA 2021



- g. Meskipun dalam APBD TA 2021 SiLPA yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp0,00 namun terealisasi sebesar Rp252.073.772.483,00. Untuk lebih jelasnya, realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat digambarkan dalam gambar III.4 berikut ini.



Gambar III.4 Realisasi SiLPA TA 2011 s/d TA 2021

2. Realisasi TA 2021 Dibandingkan dengan Realisasi TA 2020

Perbandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan TA 2021 dan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Komparasi Realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2021			Realisasi TA 2020
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(6)/(6)x100	(6)
A	Pendapatan dan Belanja				
1	Pendapatan	1.886.745.523.085,00	1.967.781.049.592,00	4,73	1.878.995.666.418,00
2	Belanja dan Transfer	2.026.673.175.551,00	1.860.097.990.936,00	(1,13)	1.881.315.428.762,00
	Surplus/(Defisit)	(139.927.652.466,00)	107.683.058.656,00	(4.741,99)	(2.319.762.344,00)
B	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	154.455.652.466,00	154.470.202.466,00	(10,78)	173.138.414.810,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	14.528.000.000,00	10.079.488.639,00	(38,40)	16.363.000.000,00
	Pembiayaan Neto	139.927.652.466,00	144.390.713.827,00	(32,63)	156.775.414.810,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	252.073.772.483,00	63,20	154.455.652.466,00

Tabel III.2 tersebut menunjukkan komparasi realisasi TA 2021 dan realisasi TA 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.967.781.049.592,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar 1.878.995.666.418,00 mengalami kenaikan 4,73 persen.
- Realisasi belanja dan transfer TA 2021 sebesar Rp1.860.097.990.936,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.881.315.428.762,00 mengalami penurunan 1,13 persen.



- c. Realisasi defisit TA 2021 sebesar Rp107.683.058.656,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang mengalami defisit sebesar (Rp2.319.762.344,00) mengalami penurunan 4,741,99 persen.
- d. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 sebesar Rp154.470.202.466,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp173.138.414.810,00 mengalami penurunan 10,78 persen.
- e. Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2021 sebesar Rp10.079.488.639,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp16.363.000.000,00 mengalami penurunan 38,40 persen.
- f. Realisasi pembiayaan netto TA 2021 sebesar Rp144.390.713.827,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp214.338.347.168,00 mengalami penurunan 32,63 persen.
- g. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2021 sebesar Rp252.073.772.483,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp154.455.652.466,00 mengalami kenaikan 63,20 persen.

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai penyumbang tertinggi, Transfer Pemerintah Provinsi sebagai penyumbang terbesar ketiga, dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan bagian terbesar dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tersebut berasal dari DAU, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah:

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - 1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penagihan pajak secara persuasif;
 - 3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.



- c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya bidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain:
- 1) Melakukan penggalan potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR);
 - 2) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian di sisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ke tahun tetap sekitar 80%, sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses gagal lelang, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat.

Berikut ini hambatan dalam pencapaian target realisasi belanja tahun anggaran 2021 berupa kegagalan tender yang terjadi di beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, antara lain pada tabel berikut:

Tabel III.3 Hambatan dalam pencapaian target realisasi belanja Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	Tahun Anggaran 2021			Ket.
		Nomor	Jenis Paket Pekerjaan	HPS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	050/1203/PKT/LapHP/DPKUKM/2021	Pembangunan Pasar Sapuran	10.648.266.586,9	Peserta lelang tidak memenuhi syarat
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	407.364.100	Tidak ada peserta yang memasukan dokumen penawaran
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	050/1218/PK/LapHP/DUPUR/2021	Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan T-1	397.397.000	Peserta lelang tidak memenuhi syarat



3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah.

4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak, sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, serta kompetensi SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.